

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ainul Gabi*, Muhammad Ghafur Wibowo

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[*ainulgabil@gmail.com](mailto:ainulgabil@gmail.com)

Abstract

This research aims to analyze the influence of general allocation funds, local original income, education and health on the human development indeks of cities and districts in West Nusa Tenggara Province as the object of research over 5 years, namely 2018 - 2022. The research method used is panel data regression. The results of the study show that the General Allocation Fund states that there is a positive relationship with the Human Development Indeks but does not have a significant effect, local revenue has a positive and significant effect on the Human Development Indeks, government expenditure for the education function states that there is a significant negative relationship with the Human Development Indeks. and government expenditure on health functions stated that there was a negative and insignificant relationship with the human development indeks in West Nusa Tenggara Province.

Keywords: General Allocation Fund; Regional Original Income; Education; Health; Human Development Indeks (HDI)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi objek penelitian selama kurung waktu 5 tahun yakni 2018 – 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) menyebutkan adanya hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia namun tidak berpengaruh signifikan, pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan menyebutkan terdapat hubungan negatif signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan menyebutkan terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU); Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendidikan; Kesehatan; Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terhadap kemajuan suatu Negara. Negara dikatakan maju bukan saja dilihat dari pendapatan domestik bruto saja akan tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum masyarakatnya (Kahang et al., 2016).

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa pembangunan nasional menjadi bagian integral dari upaya untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan pada tingkat daerah, khususnya di daerah yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan setiap tahunnya. Pembangunan daerah dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sesuai dengan prioritas kebutuhan masing-masing daerah, dan disesuaikan dengan arah serta sasaran pembangunan nasional yang telah

ditetapkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional merupakan laju penurunan jumlah penduduk yang miskin. Efektivitas dalam meningkatkan Index Pembangunan manusia merupakan suatu keharusan bagi pemerintah pusat dan Daerah dalam mengalokasikan pengeluaran disuatu negara ataupun wilayah (Susilowati & Suliswanto, 2015).

Sebagai pelaksana pembangunan, pemerintah memerlukan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar untuk pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan upaya yang serius. Pemerintah berperan aktif dalam menginvestasikan dana untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pembangunan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju (Baeti, 2013).

Reformasi tata kelola keuangan daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi memang tidak sama satu dengan lainnya. Di lain pihak banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai yang mengakibatkan daerah-daerah semacam ini mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya (Nisa, 2017).

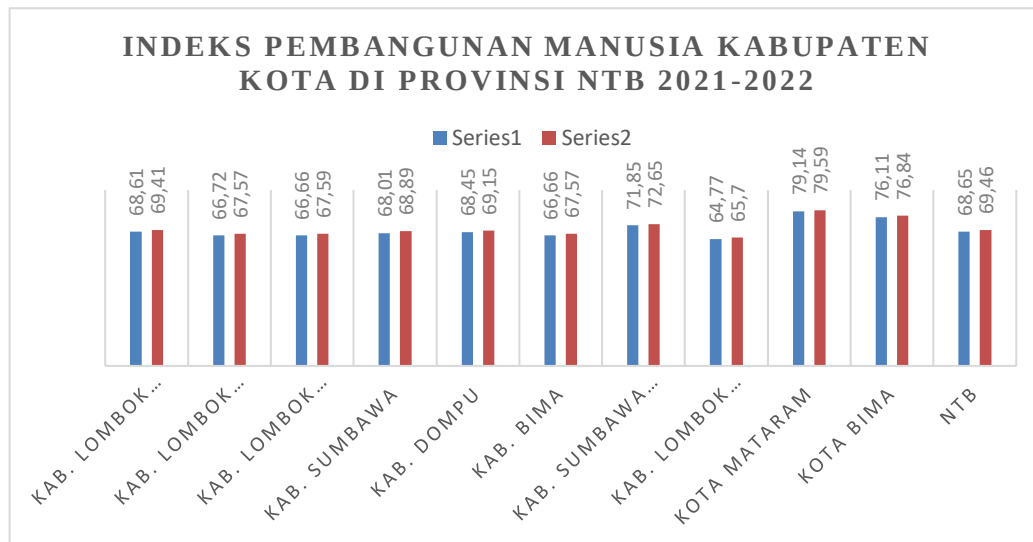
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. APBD diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah yang dimiliki. APBD terbagi kedalam pendapatan dan belanja (Mudhofir et al., 2018).

Upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia melewati instrumen kebijakan fiskal, yang dimana penyediaan pelayanan dasar dilaksanakan melalui mekanisme anggaran. Alokasi anggaran bidang kesehatan dan pendidikan masuk dalam kategori belanja sosial. dalam praktik, pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang berbeda untuk meningkatkan sumber daya manusia (Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, 2023).

Konsep IPM di Indonesia ini di landasi oleh pembukuan UUD 1945 alinea keempat dan pancasila ke lima yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. pembukuan UUD 1945 berisikan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Konsekuensi nilai keadilan pada pancasila kelima tersebut berwujud dalam hidup bersama meliputi salah satunya keadilan *distributive* yaitu suatu hubungan keadilan terhadap warga yang dalam artian negaralah yang wajib keadilan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat, memberikan bantuan, kesempatan hidup berdasarkan pada hak dan kewajiban, kesehatan dan fasilitas umum lainnya (Suib, 2017).

Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi yang memiliki dua pulau, dan berada pada bagian tengah Kepulauan Nusa Tenggara diantara Propinsi Bali dibagian barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur dibagian timur. Untuk pusat pemerintah Propinsi Nusa

Tenggara Barat berada pada Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk Kota Mataram, adapun index pembangunan manusia di tahun 2021-2022 antara lain sebagai berikut.



Grafik 1. Indeks Pembangunan Manusia
Sumber : BPS Di Olah 2023

Gambar 1 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Kota dan kabupaten di provinsi NTB selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan namun pada beberapa tahun angka index pembangunan manusia relatif sama hanya terjadi perubahan sedikit setiap tahunnya. Rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) akan berdampak pada rendahnya produktivitas kerja penduduk. Dengan demikian, pendapatan yang rendah menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih bermakna bagi masyarakat miskin karena aset utamanya adalah angkatan kerja. Keberadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat membantu meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan dan investasi di bidang pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan yang ada disuatu Daerah ataupun Negara (Riana & Khafid, 2022).

Tercapainya pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan belum maksimal dan kurang bermanfaat untuk masyarakat miskin dan masih adanya ketimpangan antar Kota dan Kabupaten yang ada di NTB. Begitu juga ketimpangan pendapatan yang terlihat dari rasio, yang hasilnya belum memuaskan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif di propinsi NTB, khususnya di kabupaten/kota belum terjadi sepenuhnya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat inklusivitas ekonomi diperlukan pengukuran menggunakan indeks pembangunan ekonomi inklusif yang ditetapkan oleh Kementerian.

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep tersebut, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual (Muhamad Basyrul Muvid & Miftahuuddin, 2022).

UUD No 33 tahun 2004 Mengamanatkan DAU yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk pemerataan kebutuhan keuangan daerah dengan tujuan terciptanya otonomi. DAU sering disebut dengan bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena

merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Williantara & Budiasih, 2016).

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah atau untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi disuatu daerah. DAU ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) disuatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi suatu daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Dan sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar, maka juga akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip diatas menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Sjafrizal, 2014).

Pendapatan asli daerah menjadi sumber pendapatan utama untuk membiayai kebutuhan daerah karena pendapatan tersebut sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diukur untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu menjalankan ekonominya secara mandiri. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana transfer dari pemerintah pusat akan semakin kecil (Afriana, 2017).

Menurut aturan pemerintah yang tertuang dalam perundang-undangan yang ada pada UUD No. 32 tahun 2004 yang mengatur mengenai asal pembentukan PAD itu sendiri yang terdiri: “Hasil pajak pada daerah yang masuk wajib kena pajak daerah, Hasil dari pungutan retribusi pada daerah yang telah ditentukan besarnya oleh masing-masing daerah, Hasil dari usaha daerah yang merupakan perusahaan yang dimiliki daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana pendapatan dari usaha ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, Penerimaan yang sah sesuai undang-undang dari dinas dan lain-lain pendapatan yang ada di daerah yang sah (Rajab & Muchtar, 2023).

Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan. Kegiatan tersebut berlangsung baik di dalam maupun di luar lingkup sekolah sepanjang hayat, bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu memainkan peran dengan tepat dalam berbagai lingkungan di masa depan (Sanniana Sidabutar et al., 2020). Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa atau negara. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa dianggap memiliki risiko tertinggal dibandingkan dengan bangsa lain. Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berkelanjutan sepanjang hayat, dengan tujuan dan arah untuk membimbing manusia atau anak didik agar berkembang menjadi individu yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya. Kehidupan seseorang melibatkan aspek kedewasaan dan berbudaya *civilized* (Herdiansyah & Kurniati, 2020).

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi ummat manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak akan pernah menghasilkan suatu yang produktivitas bagi negara. kesehatan merupakan sesuatu persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, kesehatan juga dapat dilihat sebagai suatu pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi yang sebagai input produksi agregat. Input ataupun output sebagai peran yang menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pembangunan manusia (Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2008). Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan oleh pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas (Widodo et al., 2012).

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Irianto et al., (2021) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan dana alokasi khusus dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian Saswatata & Praju (2022) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia.

Penelitian Malik et al. (2022) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Desa Terhadap Indeks pembangunan Manusia Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PAD tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap IPM dengan t hitung -1.780495 dan nilai probabilitas 0,0787 sehingga nilai probabilitas lebih besar dari 0,05; 2) DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai t hitung -10,87948 dan nilai probabilitas 0,000 sehingga nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05; 3) Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai t hitung 59,98698 dan nilai probabilitas 0,000 sehingga nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Penelitian Wulansari, (2019) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia.

Penelitian Wijaya (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian Hasan & Agung, (2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2011-2015) Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia melalui Alokasi Belanja Modal dengan standar koefisien beta $(0,916) + (-0,091504) = (0,824496)$. Dana Alokasi Umum tidak secara tidak langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia melalui Alokasi Belanja Modal dengan koefisien beta standar $(0,158) + (0,044992) = (0,202992)$. Dana Alokasi Khusus secara tidak langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia melalui Alokasi Pengeluaran Modal dengan koefisien beta standar $(-0,137) + (-0,016568) = (-0,153568)$. Koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 75,7%. Empat variabel ini mempengaruhi variabel dependen yaitu 75,3%, sedangkan 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

METODE

Studi ini memakai pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini ditandai dengan pengamatan numerik. Data yang dimaksud dianggap asli karena belum mengalami pemrosesan atau persiapan apa pun setelah pengukuran (Yusi, S dan Idris, 2020). Penelitian kuantitatif berfokus pada fenomena yang objektif dan dikaji dengan kuantitatif memakai angka angka, percobaan terkontrol dan pengolahan statistik yang terstruktur (Hamdi, 2014). Data yang dikumpulkan dari website BPS dan DJPK. Pendekatan ini dipilih untuk menginvestigasi pengaruh variabel terikat (X) terhadap variabel bebas (Y) Variabel independen yang dimaksud ialah PDRB (X1), Dana alokasi umum (X2), dana alokasi khusus (X3), pendapatan asli daerah. Populasi Studi ini terdiri seluruh kota dan kabupaten provinsi NTB 2018-2022, total sampel sebanyak 50 diperoleh dengan mengalikan jumlah kota dan kabupaten dengan periode penelitian selama 5 tahun (2018-2022).

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai data panel, yakni menggabungkan cross-sectional dan time series. Pada dasarnya, data panel dapat didefinisikan sebagai kumpulan data atau kumpulan informasi yang mengamati perilaku individu, perusahaan, dan negara selama periode waktu tertentu. Singkatnya, istilah "data panel" mengacu pada jenis dataset tertentu yang digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2013). Menurut (Widarjono, 2013) Terdapat 3 model tersedia mengukur parameter data panel, yakni CEM, FEM, dan REM.

Estimasi 3 model tersebut diolah menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman, untuk menetapkan model yang dipilih (Widarjono, 2013). Model statistik regresi data panel sebagai berikut :

$$Y_t + 1\beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \epsilon$$

Dimana :

IPM	: Indeks Pembangunan Masyarakat
i	: Kabupaten Kota Propinsi NTB
t	: Waktu 2018-2022
β_0	: Konstantan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien
X1	: Dana Alokasi Umum
X2	: Pendapatan Asli Daerah
X3	: Pendidikan
X4	: Kesehatan
ϵ	: Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Mode Data Panel

Pada dasarnya regresi data panel mempunyai tiga jenis model diantaranya adalah model common effect, model fixed effect, dan model random effect. sebelum melakukan analisis regresi data panel diperlukan pengujian untuk menentukan harau menggunakan model yang tepat ada 3 langkah pengujian model data panel yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) (Nuryanto, & Pambuko, 2018).

Uji Chow

Uji Chow yaitu untuk menguji dua model CEM dan FEM yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel tersebut. (Nuryanto, & Pambuko, 2018) menyatakan bahwa kriteria Uji Chow jika nilai probabilitas Chisquare <0,05 maka model yang dipilih yaitu fixed effect. begitu pula dengan sebaliknya, jika nilai probabilitas Chisquare >0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. di tabel di bawa ini merupakan hasil uji chow.

Tabel 1. Hasil Data Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3,175204	(9,36)	0,0063
Cross-section Chi-square	29,216840	9	0,0006

Sumber : : *Diolah Eviews 10 2023.*

Berdasarkan dari hasil tabel 1 Uji Chow di atas, nilai probability Chi-Square sebesar 0,0006 dan berada di bawah 0,05. Model yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Fixed effect.

Uji Hausmant

Uji Hausmant adalah uji untuk memilih model fixed effect dan model random effect yang tepat. (Nuryanto, & Pambuko, 2018) menyatakan bahwa kriteria Uji Hausmant adalah jika nilai probabilitas cross section random $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah fixed effect. sebaliknya, jika nilai probabilitas cross section random $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah random effect. Berikut dibawah ini merupakan hasil Uji Hausman.

Tabel 2. Hasil Uji Hausmant

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9,216610	4	0,0559

Sumber : *Diolah Eviews 10 2023*

Berdasarkan dari uji hausmant di tabel 2 di atas, nilai probability cross-section random sebesar 0,0559 dan berada di atas 0,05. maka model yang terpilih yaitu model *random effect model*.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model common effect dan model random effect. (Nuryanto, & Pambuko, 2018) menyatakan bahwa kriteria Uji Lagrange Multiplier (LM) yaitu jika nilai probabilitas menyatakan bahwa kriteria Uji Lagrange Multiplier (LM) jika nilai probabilitas *Breusch-pagan* $< 0,05$ maka model yang dipilih yaitu common effect. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Breusch-pagan* $> 0,05$ maka model yang di pilih yaitu *common effect*. berikut merupakan hasil Uji Langrage Multiplier (LM).

Tabel 3. Hasil Lagrange Multiplier

Null (no rand, effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	1,425948 (0,2324)	0,967970 (0,3252)	2,393919 (0,1218)
Honda	1,194131 (0,1162)	-0,983855 (0,8374)	0,148688 (0,4409)
King-Wu	1,194131 (0,1162)	-0,983855 (0,8374)	-0,156232 (0,5621)
GHM	-- --	-- --	1,425948 (0,2388)

Sumber : *Diolah Eviews 10, 2023.*

Berdasarkan Uji Lagrange Multiplier (LM) tabel 3 di atas, nilai probability Breusch pagan-sebesar 0,2324 dan berada diatas 0,05. maka model yang terpilih adalah model CEM

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis memiliki manfaat dalam penarikan kesimpulan terhadap penelitian, selain itu juga uji hipotesis digunakan untuk mengetahui kekuatan data. yang diolah antara lain sebagai berikut $IPM = 7179,324 + (X1) 4,99E-10 (X2) + 4,62E-09 (X3) - 2,19E-09 (X4) - 1,88E-09 + e$ tabel dibawah akan dijelaskan antara lain sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7179,324	347,6969	20,64823	0,0000
Dana Alokasi Umum	4,99E-10	3,81E-10	1,310639	0,1966
Pendapatan Asli Daerah	4,62E-09	1,66E-09	2,787230	0,0078
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	-2,19E-09	8,22E-10	-2,665097	0,0106
Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan	-1,88E-09	1,17E-09	-1,607817	0,1149
R-squared	0,244785	Mean dependent var		6808,654
Adjusted R-squared	0,177654	S.D. dependent var		1065,061
S.E. of regression	965,8326	Akaike info criterion		16,67850
Sum squared resid	41977467	Schwarz criterion		16,86970
Log likelihood	-411,9624	Hannan-Quinn criter.		16,75131
F-statistic	3,646411	Durbin-Watson stat		2,065998
Prob(F-statistic)	0,011749			

Sumber : *Diolah Eviews 10 2023.*

Persamaan regresi data panel yaitu:

$$IPM = 7179.324 + 4.99E-10 + 4.62E-09 - 2.19E-09 - 1.88E-09$$

Interprestasi dari persamaan regresi tersebut antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan hasil konstantan regresi yaitu 7179,324, jika nilai variabel Dana Alokasi Umum X_1 , Pendapat Asli Daerah X_2 , Sektor Pendidikan X_3 , dan Sektor Kesehatan X_4 tetap maka indeks pembangunan manusia Y naik sebesar 7179,324 persen. Berdasarkan hasil Regresi pengeluaran dana alokasi umum X_1 adalah 4,99, artinya jika nilai dana alokasi umum mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di 10 kota dan kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 4.99 persen.

Berdasarkan hasil regresi di atas mendapatkan hasil nilai koefisien X_2 Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,62, artinya jika nilai Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di 10 Kota dan Kabupaten Povinsi Nusa Tenggara Barat 4,62 persen, Berdasarkan hasil regresi di atas mendapatkan hasil nilai koefisien X_3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan sebesar -2,19, artinya jika nilai Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia di 10 Kota dan Kabupaten Povinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 4,62 persen. Berdasarkan hasil regresi di atas mendapatkan hasil nilai koefisien X_4 Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan sebesar -1,88, artinya jika nilai Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia di 10 Kota dan Kabupaten Povinsi Nusa Tenggara Barat 1,88 persen.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Merujuk pada temuan dari penelitian ini koefisien senilai 4,99 persen menyebutkan adanya hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia namun tidak berpengaruh signifikan di Provinsi NTB dengan nilai signifikansinya sebanyak 0,1966 artinya pengeluaran pemerintah Dana Alokasi Umum (X1) berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi NTB Tahun 2018-2022. Setiap kali terjadinya penambahan Dana Alokasi Umum akan mendorong peningkatan presentase IPM Provinsi NTB. Apabila pengeluaran pemerintah sektor Dana Alokasi Umum hingga senilai satu persen maka IPM Secara rata-rata akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah NTB mengalokasikan anggaran yang cukup besar disetiap tahunnya. dengan menyediakan pemerataan layanan umum terhadap semua masyarakat Provinsi NTB, dana alokasi umum yang telah dianggarkan oleh pemerintah untuk program yang tepat yang memiliki dampak jelas dan nyata terhadap IPM. Penelitian ini selaras dengan penelitian Sarkoro & Zulfikar (2018), dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, oleh karena itu hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Tidak adanya pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan oleh karena pengalokasian Dana Alokasi Umum lebih difokuskan pada tujuan yang lain.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Merujuk pada temuan dari penelitian ini koefisien sebesar 4,62 persen menyebutkan hubungan positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai signifikansinya sejumlah 0,0078 persen, artinya pendapatan asli daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018-2022. Setiap kali terjadinya penambahan pendapatan asli daerah akan mendorong peningkatan presentase IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apabila pendapatan asli daerah naik senilai satu persen maka IPM otomatis akan meningkat. oleh karena itu menunjukkan bahwasanya pemerintah Nusa Tenggara Barat, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap meningkatnya IPM. Penelitian ini selaras dengan penelitian Fernandes & Putra (2022) Pendapatan asli daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. berdasarkan Uji Hipotesis, dalam hasil penelitiannya ada pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah terhadap index pembangunan manusia, hal ini dapat diartikan bahwa tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah mempengaruhi meingkat atau menurunnya indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Terhadap IPM Kota Dan Kabupaten Di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Merujuk pada temuan penelitian ini nilai koefisien -2,19 persen menyebutkan terdapat hubungan negatif signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai signifikansinya sejumlah 0,0106 persen, yang dalam artinya pengeluaran pemerintah disektor pendidikan (X3) berpengaruh negatif terhadap IPM Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022. Jika pengeluaran pemerintah disektor pendidikan mengalami peningkatan sebanyak 1 persen maka nilai IPM secara rata-rata mengalami penurunan sampai -2,19 juta rupiah. Dikarenakan dibidang pendidikan pemerintah mengalokasikan anggaran diantaranya untuk meningkatkan mutu tenaga kependidikan, isentif guru dan program pendidikan beasiswa. Dana tersebut juga untuk perbaikan fisik sekolah, namun pengeluaran pemerintah disektor pendidikan lebih fokus pada pembangunan infastruktur, sehingga hal tersebut kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap Indeks pembanguan manusia NTB. Alokasi anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan wujud konkrit untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Investasi pendidikan merupakan saran untuk meningkatkan pembangunan manusia. Penelitian ini selaras dengan penelitian

Muslihatinningsih et al. (2023) dari hasil regresi memaparkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil Individual effect pada kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Dan Sumenep Memiliki Pengaruh Negatif Terhadap IPM.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap IPM Kota dan Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Merujuk pada temuan penelitian ini nilai koefisien sebesar -1,88 persen menyebutkan terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai signifikansinya sejumlah 0,1149 persen, yang dalam artinya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan (X4) berpengaruh negatif terhadap IPM Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022. Jika pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mengalami peningkatan sebanyak 1 persen maka nilai IPM secara rata-rata mengalami penurunan sampai -1,88 persen

Pengeluaran belanja pemerintah dalam sektor kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat meskipun tidak berdampak secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu yang terjadi anggaran untuk sektor kesehatan tidak mendapatkan lima persen dari APBN diluar dari pada gaji seperti yang tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009, jumlah APBD yang di realisasikan untuk kabupaten kota minimal 10%, namun pengeluaran pemerintah Provinsi NTB tahun 2018-2022 kurang dari 10%. Penelitian ini selaras dengan penelitian Palaneven et al. (2018), dari variabel pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan memiliki hasil yang negatif yaitu sebesar -1,235. dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan memiliki pengaruh yang negatif, dikarenakan besarnya dana untuk sektor kesehatan masih belum memberikan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil data dan pembahasan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum menyebutkan adanya hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia namun tidak berpengaruh signifikan, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan menyebutkan terdapat hubungan negatif signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan menyebutkan terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat

BIBLIOGRAPHY

- Afriana, riza devi. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2007-2019. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(November), 5–24.
- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, I. Y. (2023). Peranan Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM di Kabupaten Tanah Laut. *Journal of Engineering Research*, 6(1), 260–268.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011 Info Artikel. *Edaj*, 2(3), 85–98.
- Fernandes, J., & Putra, M. L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Menara Ekonomi*, VIII(1), 18–29.
- Ghozali, I. dan D. R. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan*

- Aplikasi dengan Eviews 8.* (Edisi Pert). UNDIP.
- Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, M. A., & Agung, M. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Riau Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 190–203.
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 43–50. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765>
- Irianto, I., Kisnawatu, B., Istiarto, I., & Helmida, B. E. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Ganec Swara*, 15(2), 1258. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.244>
- Kahang, M., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indkes Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 130–140. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Malik, M., Sjarlis, S., & Gusti, D. H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(4), 661–675.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. (2008). *Pembangunan Manusia*. erlangga.
- Mudhofir, F., Yulianti1, I., & Sujarwata. (2018). *Jurnal Mipa Uns*. 41(1), 1–5. <https://journal.unnes.ac.id/nju/indeks.php/JM/article/view/15813>
- Muhamad Basyrul Muvid, & Miftahuuddin. (2022). Pendidikan Islam dan Indeks Pembangunan Manusia (Telaah atas Kontribusi dan Peran Pendidikan Islam dalam Pengembangan IPM). *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 31–46. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v20i1.2604>
- Muslihatinningsih, F., Alvidiar, C., & Niken Wilantari, R. (2023). Does government spending affect Human Development Indeks in East Java Province. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(1), 138–149. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i1.19806>
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 2011–2015.
- Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi: Eviews*. UNIMMA PRESS.
- Palaneven, T. O. M., Walengwangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 52–61.
- Rajab, A., & Muchtar. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat PDRB Provinsi Sulawesi Barat. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(2), 280–289.
- Riana, A., & Khafid, M. (2022). Analysis of Government Spending on Education on the HDI. *Jejak*, 15(2), 324–335. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i2.38263>
- Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, & Pawer Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 86–101. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.109>
- Sarkoro, H., & Zulfikar, Z. (2018). Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah

- Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54–63. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1972>
- Saswatata, S. S., & Praju. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang. –*Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 11(1), 17–28.
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali Press.
- Suib, M. S. (2017). Sinergitas Peran Pondok Pesantren Dalam Peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(2), 171–191. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v1i2.34>
- Susilowati, D., & Suliswanto, M. S. W. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.89-106>
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. (Edisi keem). Yogyakarta: Ekonesia FE UII.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>
- Wijaya, L. A. W. (2018). Analisis Pengaruh Penapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016). *Jurnal Ilmiah*, 1–18.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044-2070–2070.
- Wulansari, F. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Universitas Semarang*.
- Yusi, S dan Idris, S. (2020). *Statistika untuk Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. 2020.